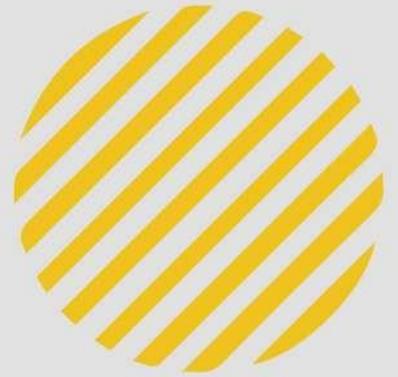




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Banteng No. 6 Palu



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji syukur pertama – tama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan. Sebagai sebuah organisasi pemerintah dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai Pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggung-jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan anggaran yang dibiayai dari APBD Tahun 2022, laporan kinerja ini disusun sebagai akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.

Palu, 10 Januari 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640919 199003 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.2.1 Tugas dan Fungsi	4
1.2.2 Struktur Organisasi	5
1.3 Isu-isu Strategis	9
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana	19
1.4.1 Sumber Daya Manusia	19
1.4.2 Sarana Prasarana	23
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	35
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	35
2.1.1 Tujuan	35
2.1.2 Sasaran	35
2.1.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	36
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	37
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	39
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	44
2.5 Perjanjian Kinerja	50



BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Capaian Kinerja	52
3.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022	52
3.1.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	54
3.1.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	55
3.1.4	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	57
3.1.5	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	57
3.2	Realisasi Anggaran	65
BAB IV	PENUTUP	75



DAFTAR TABEL

TABEL I

Tabel I.1.	Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel I.2.	Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pangkat dan Golongan	20
Tabel I.3.	Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel I.4.	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	21
Tabel I.5.	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel I.6.	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel I.7.	Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	23
Tabel I.8.	Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	23

TABEL II

Tabel II.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah “Dinas Perpustakaan dan Kearsipan”	38
Tabel II.2.	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	39
Tabel II.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	46
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	51



TABEL III

Tabel III.1. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis DISPUSAKA Prov.Sulteng Tahun 2022	52
Tabel III.2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya	54
Tabel III.3. Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026	55
Tabel III.4. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2022	58
Tabel III.5. 2022 Anggaran dan Realisasi Belanja per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pemerintahan dibidang perpustakaan. Dengan kedudukan tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan bidang perpustakaan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Sebagai rencana pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan memberikan arah Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bagian terpenting dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu : **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**.

Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun



2022. Laporan ini merupakan bahan pengukuran kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang perpustakaan serta sebagai bahan evaluasi sampai sejauhmana realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Tahun Anggaran 2022.

Eksistensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan ditindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan penyelenggaraan memberikan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

Potensi dari permasalahan pembangunan daerah pada umumnya adalah timbul dari adanya faktor internal maupun eksternal dimana kekuatan belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan maupun tantangan yang tidak diantisipasi.

Kinerja pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode lima tahun sebelumnya masih menyisakan berbagai permasalahan yang harus dicermati sehingga dapat menjadi penentu keberhasilan dimasa yang akan datang. Identifikasi permasalahan urusan perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja



pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

1. Koleksi judul buku/disiplin ilmu diperpustakaan relatif masih terbatas dibandingkan dengan variasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui koleksi bahan pustaka.
2. Minat masyarakat memanfaatkan koleksi buku bacaan diperpustakaan masih perlu ditingkatkan.
3. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas.
4. Belum optimalnya implementasi kebijakan nasional implementasi di daerah tentang kegiatan gemar membaca bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
5. Masih terbatasnya anggaran operasional yang tersedia baik APBD maupun APBN dalam upaya peningkatan layanan dan pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pembinaan semua jenis perpustakaan.
6. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih terbatas.
7. Terbatasnya sarana layanan informasi arsip, sehingga pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat belum optimal.
8. Budaya menempatkan kearsipan sebagai bagian dari tata kelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis masih rendah.
9. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang Perpustakaan (Pustakawan) dan Kearsipan (Arsiparis).



1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk karena adanya konsekuensi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berfungsi sebagai :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan



- kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut diatas, maka Struktur Organisasi



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan
 - a. Seksi Deposit
 - b. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
 - c. Seksi Konservasi Bahan Perpustakaan
4. Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
 - a. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan
 - b. Seksi Alih Media
 - c. Seksi Otomasi Perpustakaan
5. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ketenagaan Perpustakaan

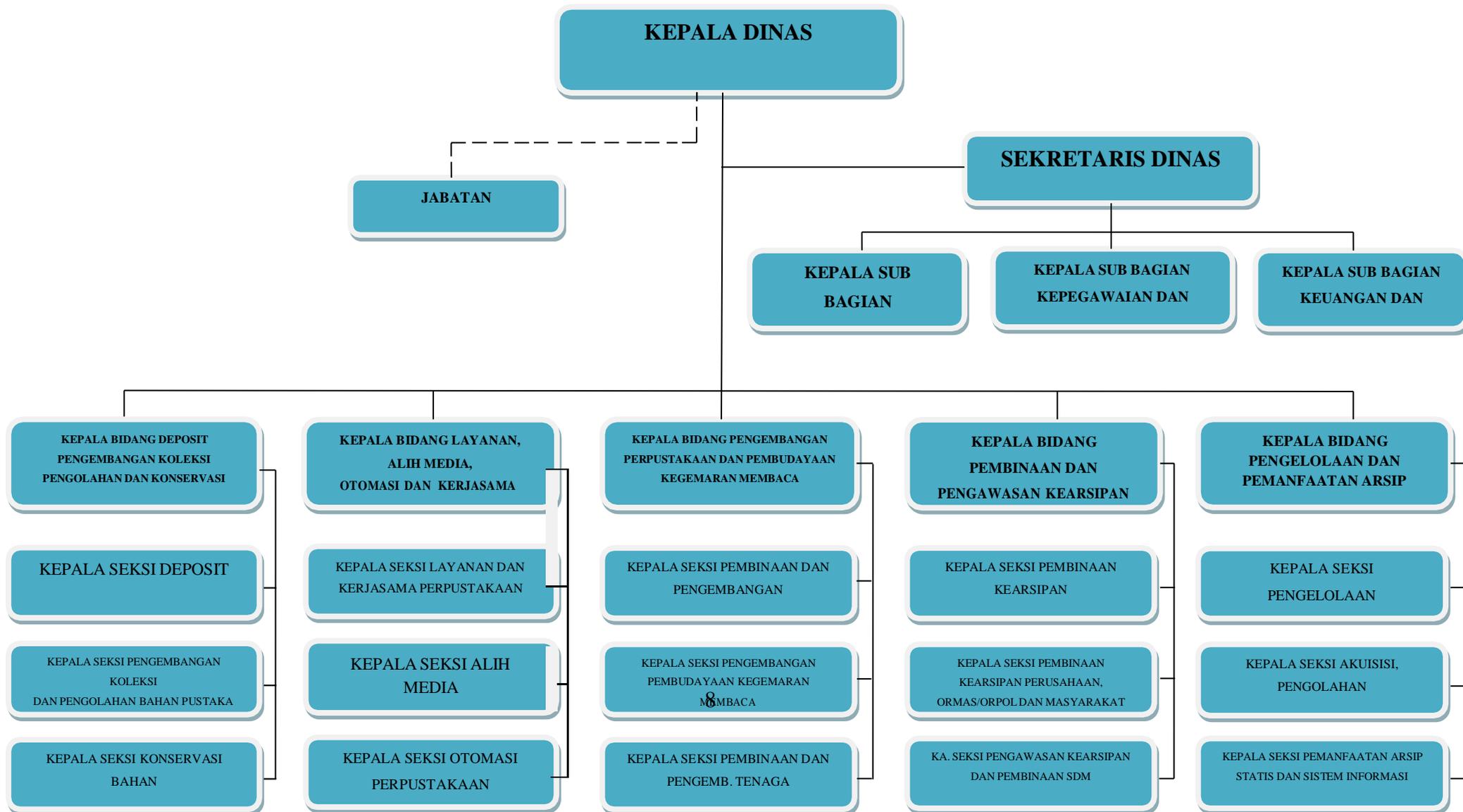


- c. Seksi Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
- a. Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah
 - b. Seksi Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat.
 - c. Seksi Pengawasan Kearsipan dan Pembinaan SDM
7. Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip
- a. Seksi Pengeloaan Arsip Dinamis
 - b. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Sistem Informasi Arsip
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Jabatan Fungsional Pustakawan
 - b. Jabatan Fungsional Arsiparis



STRUKTUR ORGANISASI (GAMBAR)

(terlampir)





1.3 Isu-isu Strategis

Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan serta pengelolaan kearsipan yang baik dan benar adalah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas serta berdaya saing dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang ingin dicapai adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan diterbitkannya undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta diakomodir didalam Perda Provinsi Sulawesi Tengah No 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi SulawesiTengah. Sejalan dengan Reformasi birokrasi yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan good governance, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan KKN secara terarah, terpadu dan sistematis. Dalam penerapannya, perlu ada perubahan mindset dan orientasi birokrasi dari yang melayani kekuasaan menjadi melayani masyarakat/ meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik menjadi isu kian strategis manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini, sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan



dan kearsipan, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab padapembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Dan jika dicermati secara seksama, maka terdapat hal-hal penting yang menjadi isu-isu strategis.

A. Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan

Peningkatan Sumber Daya manusia utama yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Pustakawan dan Arsiparis. Keduanya merupakan tulang punggung bagi pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kedua sumber daya tersebut ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini perlu dilakukan guna menyediakan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan yang tangguh serta siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan globalisasi. Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga pada gilirannya mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca di seluruh provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui SDM perpustakaan yang dimiliki harus mampu mendorong terjadinya proses transformasi yang menjadikan perpustakaan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu menjadi sarana pembangun pemahaman masyarakat, tentang pentingnya esensi keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik. Perpustakaan juga harus mampu mendorong meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, sehingga



menjadi bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya. Pembinaan terhadap SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan hanya pada pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada pembuat kebijakan dan petugas teknis pengelola perpustakaan yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di hampir pelosok daerah. Karena itu berbagai bentuk pelatihan tentang perpustakaan sudah dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas dan kuantitas tenaga terdidik di bidang perpustakaan.

Arsiparis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan, juga memiliki tugas yang tak kalah pentingnya dengan Pustakawan. Merekalah tulang punggung pengelolaan kearsipan di seluruh instansi pemerintah. Sayangnya, jumlah tenaga fungsional ini semakin berkurang dengan berbagai alasan. Hal ini perlu segera diantisipasi dengan penciptaan tenaga fungsional baru, sehingga kebutuhan lembaga terhadap tenaga khusus ini terpenuhi. Munculnya Kepmenpan No. PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional Arsiparis dan angka kreditnya, jelas makin menghambat upaya Pemprov. Kaltim menambah jumlah arsiparis tingkat terampil. Karena itu pemerintah provinsi perlu membuat kebijakan baru dengan memberi kemudahan bagi PNS yang ingin beralih menjadi fungsional Arsiparis. Kebijakan ini meliputi peningkatan kesejahteraan, kemudahan dalam berkarier serta pembinaan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk memberi jaminan pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Keberadaan Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.



Apalagi di tengah gencarnya upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat menuju good governance. Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan perlu diberdayakan sebaik-baiknya. Mereka perlu didorong agar mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mereka tidak jauh ketinggalan jaman. Apalagi dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lingkup informasi menjadi lebih beragam.

Pustakawan dan Arsiparis harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka haruslah aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada. Tuntutan masyarakat akan layanan informasi di tengah era keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan, agar ke depan mampu menyediakan informasi bagi publik. Sebagai pengelola informasi, Pustakawan dan Arsiparis harus mampu meningkatkan produktivitas pengolahan khsanah dan koleksinya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu, kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga pengolah perlu senantiasa ditingkatkan. Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang berpihak pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Pustakawan, Arsiparis, tenaga teknis



pengelola perpustakaan dan tenaga teknis pengelola kearsipan adalah aset penting bagi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Mereka harus diberi motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka lebih leluasa berkisah dan berkreasi dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Karena itu sudah sewajarnya pemerintah provinsi memberi apresiasi tersendiri, agar kinerja perpustakaan dan kearsipan dapat berhasil dan berdayaguna dengan baik.

B. Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan

Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah saatnya perpustakaan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) ini untuk pengelolaannya. Sistem otomatisasi dan digitalisasi bahan pustaka perlu dilakukan. E-Library menjadi begitu penting untuk pengembangan layanan perpustakaan di tengah maraknya era gadget dewasa ini. ELibrary memungkinkan pengunjung perpustakaan bisa mengakses buku pustaka, tanpa harus datang ke perpustakaan. Merujuk dari perkembangan teknologi tersebut maka lahirlah iKaltim, sebuah sarana membaca yang memudahkan para pemustaka untuk membaca di manapun dan kapan saja. Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara computerized. Pengguna yang datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku secara manual dengan katalog. Data buku koleksi perpustakaan sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna bisa mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan.

Demikian pula hal berbicara tentang kearsipan peraturan perundangan tentang kearsipan masih terbatas. Hal ini cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu Dinas Perpustakaan Dan



Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya menghasilkan produk-produk hukum kearsipan yang nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui produk hukum kearsipan diharapkan, sistem kearsipan dapat berjalan dengan baik di setiap Perangkat Daerah. Dengan begitu tertib arsip dan administrasi dapat terwujud. Jika tertib arsip dan tertib administrasi dapat terwujud di setiap Perangkat Daerah, maka manajemen kearsipan dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Dan pemerintahan yang baik dan bersih , seperti yang diharapkan dalam reformasi birokrasi dapat terwujud.

Penyelamatan arsip yang bernilai dari lembaga pemerintah maupun swasta juga dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini sudah tentu memudahkan lembaga kearsipan melakukan penilaian dan pengakuisisian terhadap arsip-arsip tersebut.

Di satu sisi, dengan sistem administrasi kearsipan yang baik, setiap Perangkat Daerah bisa dengan mudah melakukan penyusutan terhadap arsip-arsip yang dimiliki. Arsip yang masih memiliki nilai bagi kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai arsip dinamis. Sedangkan arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi bernilai guna kesejarahan dapat disimpan di lembaga kearsipan, melalui akuisisi. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun baik bagi lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan, dapat dimusnahkan. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui penilaian oleh tim yang telah ditentukan.

Fenomena Pilkada dapat dijadikan sebagai momen bagi lembaga



kearsipan untuk mendapatkan arsip bernilai informasi tinggi. Arsip harus sudah dikelola sejak diciptakan. Dengan begitu, akan memudahkan petugas ketika melakukan pendataan hingga penataan arsip di KPUD.Desa sebagai wilayah administrasi terkecil dalam lembaga pemerintahan, juga perlu dikembangkan sistem administrasinya. Program Arsip Masuk Desa menjadi upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui pembinaan kearsipan terhadap Sekretaris Desa di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah.

Jika setiap Perangkat Daerah dan lembaga-lembaga penghasil arsip dapat menjalankan manajemen arsip secara baik dan benar, tentu upaya penyelamatan arsip yang bernilai guna dapat dicapai.Dengan berjalannya manajemen kearsipan, sudah tentu memerlukan sarana prasarana yang memadai untuk penyimpanannya. Dan ini sering menjadi kendala bagi lembaga, sehingga banyak arsip ditemukan dalam kondisi yang rapuh bahkan kacau karena tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Jika ini terjadi pada arsip-arsip yang bernilai guna, tentu akan membahayakan penyelamatan aset penting negara. Karena itu pengelolaan arsip harus diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana serta upaya pelestariannya.

Di sisi lain, hadirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan. Banyak lembaga yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi lembaganya serta menghasilkan arsip elektronik. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Sudah tentu



ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip elektronik tersebut.

C. Budaya Baca, Akses Perpustakaan dan Dimensi Informasi serta pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno (Manuskrip)

Berdasarkan hasil survei/ riset UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa minat baca masyarakat yang paling rendah di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah negara Indonesia. Rendahnya minat baca ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang baru sekitar 0,001, artinya dari seribu penduduk, hanya ada satu orang yang masih memiliki minat baca tinggi. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura yang memiliki indeks membaca sampai 0,45. Sementara itu, berdasarkan studi Most Littered Nation In the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Hanya setingkat di atas Botswana (61).

Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kurangnya kesadaran publik akan arti penting membaca bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan diri maupun bangsa. Selain itu, maraknya media elektronik (televisi dan internet) yang kebanyakan berisi tayangan hiburan, pornografi, iklan komersial, dan hal-hal hedonistis lainnya menjauhkan masyarakat dari budaya membaca.



Faktor lain yang menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia adalah kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi menyebabkan akses masyarakat terhadap buku-buku bermutu semakin sulit, karena untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sudah kesulitan, apalagi membeli koran, buku, atau bacaan lainnya. Rendahnya minat baca ini akan mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia, karena masyarakat Indonesia tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga, perlu menumbuhkan minat baca sejak usia dini sebagai salah satu upaya penanaman rasa senang membaca pada diri individu

Pemanfaatan layanan perpustakaan baru sebatas masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal jauh secara geografis dari pusat kota seperti masyarakat urban, masyarakat pedesaan, perbukitan, maupun daerah perbatasan dan tertinggal lainnya masih termarginalisasi dalam akses sumber-sumber bacaan dan informasi. Hal ini disebabkan berbagai faktor yaitu (1) daya beli masyarakat yang rendah terhadap bahan bacaan, (2) jumlah terbitan nasional terbatas setiap tahun, disamping pendistribusian yang tidak merata menjangkau komunal masyarakat, (3) keinginan atau minat masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan membaca dan menulis, serta (4) perpustakaan dalam memfasilitasi kebutuhan membaca belum tersedia secara maksimal.



Instrumen strategis dalam pemenuhan kebutuhan bacaan masyarakat adalah penguatan kelembagaan perpustakaan serta diversifikasi layanan perpustakaan, sehingga akses masyarakat terhadap bacaan dan sumber informasi lainnya dapat diakses dengan cepat dan murah. Kebutuhan minimal perpustakaan di masyarakat ditinjau dari aspek kelembagaan dan administrasi pemerintahan memerlukan kurang lebih 794.023 perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sekarang ini belum representatif. Salah satunya perpustakaan sekolah baru mencapai 5.74 % yang memiliki perpustakaan. Sedangkan perpustakaan masyarakat (perpustakaan kecamatan/ desa/ kelurahan/rumah ibadah) baru mencapai 0.28 % yang memiliki perpustakaan.

D. Kelembagaan Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, maka telah ditetapkan perpustakaan sebagai salah satu urusan wajib. Sehubungan dengan itu, sebagai urusan wajib bagi daerah otonom dalam hal pelayanan publik yang menunjang keberhasilan di bidang pendidikan maka sudah saatnya Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperhatikan pengembangan perpustakaan dan kearsipan, khususnya kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota. Saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah telah terbentuk 9 Perpustakaan Umum Kab/Kota dari 10 Kab/Kota yang ada.



1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Perubahan Nomenklatur dan Struktur Organisasi memberikan dampak Perubahan Komposisi dan jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan serta arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan. Adapun jumlah pegawai yang bekerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 107 orang terdiri dari laki-laki 47 orang dan perempuan 60 orang. dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel I.1. Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	DISPUSAKA	47	43.93	60	56.07	107



Tabel I.2. Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	GOLRU	JENIS KELAMIN				JMLH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	I/a	0	-	0	-	0
2	I/b	0	-	0	-	0
3	I/c	0	-	0	-	0
4	I/d	0	-	0	-	0
5	II/a	2	-	0	-	2
6	II/b	8	7.48	2	1.87	10
7	II/c	0	-	0	-	0
8	II/d	5	4.67	1		6
9	III/a	4	3.74	5	4.67	9
10	III/b	8	7.48	11	10.28	19
11	III/c	4	3.74	12	11.21	16
12	III/d	8	7.48	18	16.82	26
13	IV/a	6	5.61	6	5.61	12
14	IV/b	1	0.93	4	3.74	5
15	IV/c	0	-	1	0.93	1
16	IV/d	1	0.93	0	-	1
17	IV/e	0	-	0	-	0
Total		47	43.93	60	56.07	107



Tabel I.3. Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PDDKN	JENIS KELAMIN				JMLH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	SD	0	0.00	0	-	0
2	SMP	0	0.00	0	-	0
3	SMA/SMK	18	16.82	10	9.35	28
4	D.I	0	0.00	0	-	0
5	D.II	0	0.00	0	-	0
6	D.III	3	2.80	8	7.48	11
7	SI / D.IV	15	14.02	32	29.91	47
8	S2	11	10.28	10	9.35	21
9	S3	0	0.00	0	-	0
TOTAL		47	43.93	60	56.07	107

Tabel I.4. Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

NO	ESS	FORMASI	TERISI	LOWONG	KETERANGAN
1	I.b	0	0	0	
2	II.a	1	1	0	
3	II.b	0	0	0	
4	III.a	6	6	0	
5	III.b	0	0	0	
6	IV.a	18	18	0	
TOTAL		25	25	0	



Tabel I.5. Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin

NO	ESS	PRIA	WANITA	JMLH	SDH PIM	BLM PIM	KETERANGAN
1	I.b	0	0	0	0	0	
2	II.a	1	0	1	1	0	PIM
3	II.b	0	0	0	0	0	
4	III.a	2	4	6	4	2	4 PIM
5	III.b	0	0	0	0	0	
6	IV.a	9	9	18	7	11	7 PIM
TOTAL		12	13	25	12	13	

Tabel I.6. Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PDDKN	ESELON				JMLH
		I	II	III	IV	
1	SMA/SMK	0	0	0	0	0
2	D.I	0	0	0	0	0
3	D.II	0	0	0	0	0
4	D.III	0	0	0	0	0
5	SI / D.IV	0	0	1	10	11
6	S2	0	1	5	8	14
7	S3	0	0	0	0	0
TOTAL		0	1	6	18	25



Tabel I.7. Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						JMLH AHLI + TERAMPIL
		AHLI		JMLH AHLI	TERAMPIL		JMLH TERAMPIL	
		P	W		P	W		
1	PUSTAKAWAN	1	3	4	3	17	20	24
2	ARSIPARIS	0	2	2	1	3	4	6
TOTAL		1	5	6	4	20	24	30

Tabel I.8. Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	Struktural	12	13	25
2	Fungsional	5	25	30
3	Pelaksana	30	22	52
TOTAL		47	60	107

1.4.2 Sarana Prasarana

Selain dari pada itu didukung pula sarana dan prasarana yang memadai seperti :

1. Gedung Perpustakaan dan Arsip yang representatif terdiri dari
 - a. Gedung Administrasi dan Layanan Perpustakaan
 - b. Gedung Pengolahan, Penyimpanan dan Layanan Informasi Arsip
2. Koleksi Perpustakaan
 - a. Koleksi Umum : 68.174 judul 373.096 eks
 - b. Koleksi deposit : 5.601 judul 7.427 eks



3. Perlengkapan Mobiler

4. Kendaraan Operasional

- a. Mobil Perpustakaan Keliling : 3 unit
- b. Mobil Operasional : 4 unit
- c. Mobil Layanan Arsip Keliling : 1 unit

5. Perlengkapan mobiler penunjang kegiatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan seperti Rak Buku, Lemari Buku, Lemari Display, Perangkat Audio Visual, Peralatan Jaringan Sistem Otomasi Perpustakaan (e-Library), Meja dan Kursi Baca, Lemari Katalog, Lemari Penyimpanan Arsip, Box Arsip, Meja Sirkulasi, dll.

6. Ruang layanan yang representatif terdiri dari :

- a. Ruang Layanan Koleksi Anak-Anak
- b. Ruang Layanan Koleksi Digital dan Layanan IT
- c. Koleksi CD/DVD
- d. Layanan akses internet
- e. Layanan database on-line
- f. Layanan koleksi umum
- g. Layanan koleksi rujukan (referensi)
- h. Layanan koleksi deposit Sulawesi Tengah
- i. Layanan terbitan berkala (majalah, surat kabar, jurnal dll)
- j. Audio visual untuk pemutaran film, CD dan DVD
- k. Diskusi/seminar/ pertemuan
- l. Corner Sulawesi Tengah



7. Sarana Penelusuran Informasi terdiri dari :

- a. Katalog on-line (OPAC = On-Line Public Access Catalogue)
- b. Bibliografi Nasional dan Daerah
- c. Katalog Induk Nasional dan Daerah
- d. Abstrak (sari karangan)

8. Fasilitas Lainnya

- a. Computer client dan hotspot : untuk akses internet dan akses koleksi CD/DVD
- b. Armada Mobil Perpustakaan Keliling
- c. Foto Copy : Melalui fasilitas ini koleksi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dicopy sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta dan peraturan yang berlaku pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Klinik Pustakawan : Fasilitas ini merupakan sarana komunikasi dan informasi kepustakawanan
- e. Ruang display buku baru
- f. Mushola, kantin, toko koperasi, dan toilet
- g. Pojok CSR (sarana bantuan dari beberapa pihak ketiga)

9. Pendayagunaan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan

Produk jasa layanan perpustakaan yang ditawarkan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk masyarakat Kalimantan Timur terdiri dari produk jasa layanan. Secara garis besar layanan yang diberikan dikelompokkan sebagai berikut



a. Layanan Sirkulasi

Layanan yang diberikan dalam bentuk jasa peminjaman dan pengembalian buku-buku umum maupun koleksi sekolah.

b. Layanan Referensi

Layanan yang menyediakan koleksi rujukan berupa buku-buku referensi seperti; kamus, ensiklopedia, biografi, direktori handbook dan lain-lain.

c. Layanan Perpustakaan Digital

Layanan yang menyediakan jasa akses internet, layanan koleksi digital edutainment dalam format VCD/DVD.

d. Layanan Wisata Perpustakaan

Layanan yang diberikan kepada pengunjung atau anggota perpustakaan khususnya anak-anak TK atau SD secara berkelompok untuk mendengarkan cerita/dongeng dan pemutaran film edukas.

e. Layanan Perpustakaan Keliling

Layanan peminjaman bahan pustaka umum maupun sekolah dengan menggunakan armada mobil Perpustakaan keliling yang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara geografis dan sosial tidak terlayani oleh perpustakaan permanent

f. Layanan Informasi Koleksi Terbaru

Layanan yang menyediakan informasi tentang koleksi terbaru yang akan dilayankan pada masyarakat. Layanan ini dilaksanakan dalam



bentuk display buku-buku baru pada ruang lobby utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

g. Bimbingan Pemakai.

Layanan yang diberikan dalam bentuk memberikan arahan pemakai dalam mendayagunakan sumber daya informasi yang tersedia di perpustakaan.

h. Jasa Kearsipan dan Konsultasi Kearsipan

Layanan yang diberikan berupa konsultasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan kearsipan, sejak dari tata persuratan, pengurusan surat, pengelolaan arsip aktif, penanganan arsip inaktif sampai dengan penyusutan arsip/dokumen (termasuk penyusunan JRA)

i. Pembuatan Sistem Kearsipan

Layanan perancangan Sistem kearsipan yang dirancang dan dibuat sesuai dengan kondisi dan keinginan instansi masing-masing, sehingga akan membantu di dalam kelancaran kegiatan administrasi, karena sistem tersebut meliputi sejak arsip diciptakan, digunakan sampai dengan disusutkan.

j. Penyempurnaan Sistem Kearsipan

Layanan yang dipergunakan untuk menyempurnakan sistem yang telah ada dengan memperhatikan kaidah-kaidah kearsipan sehingga merupakan sistem yang aplikatif

k. Pembuatan SOP Kearsipan



Memberikan layanan pembuatan SOP kearsipan OPD, Badan Usaha dan Organisasi Pendidikan, Kemasyarakatan dan Politik.

l. Otomasi Kearsipan

Layanan penggunaan sarana elektronik guna mendukung pengelolaan arsip/dokumen agar informasinya dapat diakses dengan lebih cepat.

m. Pembenahan/ Penataan Arsip/ Dokumen

Layanan untuk membantu merekonstruksi/menata ulang dan melaksanakan pembenahan/penataan arsip/dokumen kacau secara tepat dan benar baik fisik maupun informasinya. Hasil dari pembenahan arsip/dokumen adalah tertatanya fisik dan informasi berupa daftar sebagai jalan masuk untuk penemuan kembali arsip/dokumen yang dapat dibuat secara manual maupun elektronik.

n. Penyimpanan Arsip/ Dokumen

Jasa layanan penyimpanan sekaligus layanan pemakaian arsip/dokumen, pengiriman boks dan pengambilan arsip/dokumen. Ruang penyimpanan dirancang dengan spesifikasi ruang tahan api dan menggunakan AC selama 24 jam untuk Magnetic Tape, Catridge, CD-Rom, Disket, Mikrofilm, Microfiche dan Arsip Vital;

o. Perawatan Arsip/Dokumen

Layanan jasa perawatan arsip/dokumen meliputi perawatan arsip /dokumen, fumigasi, laminasi arsip/dokumen tekstual/kertas yang telah rusak/rapuh, dan penjilidan arsip/dokumen serta pengujian arsip konvensional;



p. Reproduksi Arsip/ Dokumen

Layanan pengerjaan reproduksi arsip/dokumen dari berbagai ukuran dan jenis yang dibutuhkan, baik arsip tekstual maupun media baru.

q. Alih Media Arsip/ Dokumen

layann alih media arsip/dokumen dari media konvensional ke media digital.

r. Pemeliharaan dan Perawatan Pusat Arsip/ Dokumen

Bagi organisasi pemerintah maupun swasta yang sudah memiliki pusat arsip/dokumen sendiri, pada Bagian Layanan Kearsipan memberikan layanan jasa dalam pemeliharaan dan perawatan pusat arsip/dokumen.

s. Layanan Wisata Arsip

Memperkenalkan tentang informasi seputar dunia kearsipan serta pengenalan seputar sejarah di Provinsi Sulawesi Tengah dan di NKRI, baik melalui pemutaran film sejarah dan informasi tentang kearsipan serta kunjungan pada Galery atau ruang pameran arsip. Diperuntukkan untuk masyarakat umum, Dunia Pendidikan, OPD dan Organisasi.

t. Layanan Pengadaan Peralatan/ Sarana Kearsipan

Menyediakan peralatan/sarana kearsipan baik untuk arsip tekstual maupun arsip media baru, seperti : Boks arsip, rak arsip, folder, guide, mikrofiche dll.



1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Rekomendasi tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi sakip tahun 2021 terhadap permasalahan dalam pencapaian sasaran/kinerja organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi sulawesi tengah, yaitu :

1. Rekomendasi dari hasil monitoring pencapaian Target Jangka Menengah dalam Renstra agar di tindak lanjuti.
2. Melakukan Reviu Renstra secara berkala.
3. Menggunakan target kinerja yang di perjanjikan untuk mengukur keberhasilan antara lain dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward).
4. Memonitor pencapaian rencana aksi atas kinerja secara berkala dan tidak hanya terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja.
5. Melakukan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
6. Data kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yang mensupervisi, serta sumber daya valid), data kinerja yang diperoleh tepat waktu dan data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal.



7. Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
8. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
9. Menjadikan IKU sebagai alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, penganggaran dan perjanjian kinerja, dan menjadikan IKU sebagai alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA).
10. Melakukan Monitoring atas pencapaian target kinerja eselon III dan IV dengan mengacu pada syarat-syarat yang ditentukan.
11. Menjadikan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sebagai dasar pemberian reward & punishment.
12. Melakukan reuiu secara berkala terhadap IKU.
13. Menindaklanjuti hasil pengukuran rencana aksi yaitu hasil pengukuran RA dijadikan dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja, dijadikan dasar untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan



hasil pengukuran RA dijadikan dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

14. Dalam laporan kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU yang baik dan SMART serta sesuai dengan tugas dan fungsi. Menggambarkan core business, mempertimbangkan isu strategis yang berkembang, menggambarkan hubungan kausalitas (antara outcome-output-process-input) serta mengacu pada praktik2 terbaik.

15. Informasi kinerja yang dimuat dalam laporan kinerja agar menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, laporan kinerja menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian2 kinerja outcome atau output penting, bukan hanya proses atau realisasi kegiatan2 yang ada di dokumen anggaran (DIPA), laporan kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan mencakup target vs realisasi, realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sebelumnya, realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka menengah, realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN dan realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.



16. Laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
17. Menyusun laporan kinerja yang dapat diandalkan yakni datanya valid, dapat ditelusuri ke sumber datanya, diperoleh dari sumber yang kompeten, dapat diverifikasi dan konsisten.
18. Menggunakan informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan, artinya laporan kinerja yang disusun sampai dengan saat ini telah berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.
19. Menggunakan informasi yang disajikan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, artinya informasi yang disajikan dalam laporan kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara teratur.
20. Menggunakan informasi yang disajikan laporan kinerja untuk peningkatan kinerja, artinya terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja (termasuk laporan kinerja tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.



21. Menggunakan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk penilaian kinerja, artinya: informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.
22. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dan hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
23. Melakukan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program dimana terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah (akan) ditindaklanjuti, evaluasi program telah disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan.
24. Melakukan pemantauan atas rencana aksi tiap bulan dan memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.
25. Menindaklanjuti hasil evaluasi program dalam bentuk langkah-langkah nyata untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil telaah Visi, Misi Gubernur Sulawesi Tengah maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah **“Terwujudnya pelayanan publik yang prima”**. Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan **“Terwujudnya pelayanan publik yang prima”** Maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran strategis jangka menengah yang merupakan indikator pencapaian hasil



yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Sasaran yang akan menjadi indikator ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

Sasaran yang akan menjadi indikator ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang representatif.
2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi.

2.1.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya.



2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Konsep dan kerangka strategi manajemen Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, disusun atas dasar permasalahan dan isu - isu strategis nasional yang ada dan dengan memperhatikan sasaran - sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun mendatang, guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi pencapaian tujuan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Analisis permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan menjadi basis utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan harus dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang selanjutnya akan



dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 9. sebagai berikut:

Tabel II.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah “Dinas Perpustakaan dan Kearsipan”

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan	Meningkatnya Standar Pelayanan Publik	Mengembangkan layanan perpustakaan digital dan pembudayaan gemar membaca
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang representatif			Mengembangkan literasi berbasis inklusi sosial
				Meningkatkan pelestarian karya cetak dan naskah kuno milik daerah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyimpanan perawatan dan pelestarian naskah kuno
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Meningkatnya penciptaan arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengelolaan kearsipan baik	Meningkatkan pengelolaan arsip dan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan	Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan statis
					Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan



2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 terdiri dari beberapa prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026. Pemenuhan persentase peningkatan minat baca masyarakat dan pemenuhan persentase OPD yang mengelola arsip daerah sesuai standart menjadi prioritas dalam mendukung terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing.

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan terkait langsung pencapaian sasaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 10. sebagai berikut:

Tabel II.2. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-)
1	2	3	4	5	6
		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 18,102,346,488	Rp 20,188,867,824	Rp 2,086,521,336
	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang Representatif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Rp 17,477,220,388	Rp 19,023,283,701	Rp 1,546,063,313
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 16,434,128,318	Rp 17,017,453,231	Rp 583,324,913
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 294,023,000	Rp 320,327,000	Rp 26,304,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp -
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 3,000,000	Rp 4,650,000	Rp 1,650,000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Rp 3,745,000	Rp 4,020,000	Rp 275,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 238,968,000	Rp 258,862,000	Rp 19,894,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 45,310,000	Rp 49,795,000	Rp 4,485,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 14,228,302,683	Rp 14,372,781,262	Rp 144,478,579
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 12,871,702,683	Rp 12,958,471,262	Rp 86,768,579
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1,356,600,000	Rp 1,414,310,000	Rp 57,710,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 57,500,000	Rp 13,500,000	-Rp 44,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 39,500,000	Rp -	-Rp 39,500,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 18,000,000	Rp 13,500,000	-Rp 4,500,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 432,464,643	Rp 797,809,043	Rp 365,344,400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 112,022,029	Rp 123,327,029	Rp 11,305,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 31,117,614	Rp 31,117,614	Rp -
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 31,627,500	Rp 24,631,500	-Rp 6,996,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 257,697,500	Rp 618,732,900	Rp 361,035,400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 77,744,780	Rp 92,516,780	Rp 14,772,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 77,744,780	Rp 92,516,780	Rp 14,772,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 519,671,712	Rp 573,747,646	Rp 54,075,934
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 453,621,712	Rp 509,817,646	Rp 56,195,934
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 66,050,000	Rp 63,930,000	-Rp 2,120,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 824,421,500	Rp 846,771,500	Rp 22,350,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 265,200,000	Rp 265,200,000	Rp -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 123,120,000	Rp 140,470,000	Rp 17,350,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 351,101,500	Rp 351,101,500	Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 85,000,000	Rp 90,000,000	Rp 5,000,000
2.	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang Representatif	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 892,158,850	Rp 1,834,807,475	Rp 942,648,625
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 659,013,600	Rp 876,208,600	Rp 217,195,000
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Rp 66,897,500	Rp 51,530,000	-Rp 15,367,500
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Rp 27,337,000	Rp 27,337,000	Rp -
		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp 81,230,000	Rp 120,874,750	Rp 39,644,750
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Rp 40,970,000	Rp 148,722,000	Rp 107,752,000
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 95,370,250	Rp 196,768,500	Rp 101,398,250
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan	Rp 242,537,000	Rp 275,795,500	Rp 33,258,500
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Rp 63,245,000	Rp 15,120,000	-Rp 48,125,000
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 41,426,850	Rp 40,060,850	-Rp 1,366,000
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Rp 233,145,250	Rp 958,598,875	Rp 725,453,625
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Rp 18,050,000	Rp 400,299,250	Rp 382,249,250
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Rp 110,496,000	Rp 109,902,000	-Rp 594,000
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp 88,225,500	Rp 182,146,475	Rp 93,920,975
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Rp 16,373,750	Rp 266,251,150	Rp 249,877,400



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rp 150,933,220	Rp 171,022,995	Rp 20,089,775
		Pelestarian karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi	Rp 16,885,025	Rp 36,974,800	Rp 20,089,775
		Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Rp 16,885,025	Rp 36,974,800	Rp 20,089,775
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Rp 96,910,695	Rp 96,910,695	Rp -
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Rp 52,800,695	Rp 52,800,695	Rp -
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalimediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestariakan dan Didayagunakan	Rp 44,110,000	Rp 44,110,000	Rp -
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 37,137,500	Rp 37,137,500	Rp -
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara/Rapat Seleksi Pengadaan Literasi	Rp 20,220,000	Rp 20,220,000	Rp -
		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Rp 16,917,500	Rp 16,917,500	Rp -
4.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN	Rp 625,126,100	Rp 1,165,584,123	Rp 540,458,023
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 509,985,850	Rp 1,050,443,873	Rp 540,458,023
		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Rp 332,111,850	Rp 452,246,600	Rp 120,134,750
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Rp 48,776,100	Rp 168,911,200	Rp 120,135,100
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Rp 10,437,000	Rp 10,437,000	Rp -
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Rp 272,898,750	Rp 272,898,400	-Rp 350
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Rp 58,996,000	Rp 221,709,000	Rp 162,713,000
		Pengumpulan dan Penyimpanan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Rp 32,677,500	Rp 32,677,500	Rp -
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Rp 26,318,500	Rp 189,031,500	Rp 162,713,000
		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Rp 118,878,000	Rp 376,488,273	Rp 257,610,273



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Rp 22,090,000	Rp 22,090,000	Rp -
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Rp 96,788,000	Rp 354,398,273	Rp 257,610,273
5.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp 115,140,250	Rp 115,140,250	Rp -
		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Rp 14,688,800	Rp 14,688,800	Rp -
		Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Rp 9,205,000	Rp 9,205,000	Rp -
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Rp 5,483,800	Rp 5,483,800	Rp -
		Perlindungan dan penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Provinsi	Rp 17,995,000	Rp 17,995,000	Rp -
		Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Rp 8,790,000	Rp 8,790,000	Rp -
		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Rp 9,205,000	Rp 9,205,000	Rp -
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi Yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Rp 45,133,800	Rp 45,133,800	Rp -
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Rp 10,746,000	Rp 10,746,000	Rp -
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Rp 10,746,000	Rp 10,746,000	Rp -
		Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Rp 23,641,800	Rp 23,641,800	Rp -
		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Rp 17,444,500	Rp 17,444,500	Rp -



	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp 9,717,000	Rp 9,717,000	Rp -
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp 7,727,500	Rp 7,727,500	Rp -
	Pencarian Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang	Rp 19,878,150	Rp 19,878,150	Rp -
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Rp 9,205,000	Rp 9,205,000	Rp -
	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Rp 6,388,050	Rp 6,388,050	Rp -
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Rp 4,285,100	Rp 4,285,100	Rp -
	Jumlah	Rp 18,102,346,488	Rp 20,188,867,824	Rp 2,086,521,336

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menjalankan tugas Pokok, maka harus dilakukan sinkronisasi ulang menyangkut indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Daerah. Sinkronisasi dan penyesuaian bukan sekedar dari segi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan namun juga menyangkut pembiayaan/penganggaran ulang kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Indikator merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan capaian kinerja dalam suatu organisasi. Penggunaan indikator kinerja perlu diperhatikan jika indikator tersebut akan diterapkan dalam pemberian rekomendasi pada program yang dijalankan. Kriteria indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok organisasi meliputi : spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dan fleksibel terhadap perubahan. Mengingat program pembangunan



bidang perpustakaan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik, maka indikator kinerja pada masing-masing unit program tidak sama.

Indikator kinerja utama pada masing-masing program dan kegiatan yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 11. berikut :



Tabel II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Tercapainya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan	indeks	75	76.61	80	85	88.5	90
		Meningkatnya Kegemaran Minat Baca Meningkat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Orang	8665	10377	12089	13801	15513	17225
			Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	45873	52492.8	59112.6	65732.4	72352.2	78972



		Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Angka	0.17	0.18	0.19	0.2	0.22	0.23
		Jumlah rata-rata Pengunjung Perpustakaan Pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	722	865	1007	1150	1293	1435
		Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Buku	2500	2654	2808	2962	3116	3270
		Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki Sertifikat	Orang	29	29	30	30	31	32
	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas	Pemenuhan Koleksi Kekhasan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	-	600	1000	1400	1800	2200



	Perpustakaan yang representatif	Penghargaan gerakan budaya gemar membaca di tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat	Orang	152	525	525	525	525	525
		jumlah Perpustakaan yang melaksanakan kegiatan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan	8	9	10	12	8	12
		terlaksanannya perpustakaan berbasis inklusi sosial	Kab/Kota	13	13	13	13	13	13
		Jumlah para pengelola perpustakaan dan pustakawan	Orang	102	142	162	177	212	212
		jumlah Perpustakaan Sekolah yang mendapatkan Akreditasi	Perpustakaan	6	9	19	18	17	24



			Terlaksananya Kegiatan Gemar Membaca	Kab/Kota	13	13	13	13	13	13
			Pemenuhan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Eks	452	860	1313	1766	2219	2669
2		Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku (Pengelolaan Arsip secara Baku)	OPD	1	1	1	1	1	1
			Peningkatan SDM Pengelola Kerasipan	Orang	8	8	8	8	8	8



2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014. disebutkan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ditetapkan sebagaimana dalam tabel.12 sebagai berikut:



Tabel II.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Perpustakaan yang Representatif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	63,3%
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13 Indeks
4.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Persentase Pencipta Arsip dan LKD Yang Memperoleh Kualifikasi Pengawasan Kearsipan "Baik"	1 Laporan
		Persentase Dalam Pelestarian Arsip Daerah	100%

Program		Anggaran	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	17,017,453,231.00
2.	Pembinaan Perpustakaan	Rp	1,834,807,475.00
3.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp	171,022,995.00
4.	Pengelolaan Arsip	Rp	1,050,443,873.00
5.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	115,140,250.00
J U M L A H		Rp	20,188,867,824.00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja DISPUSAKA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis DISPUSAKA Tahun 2022 dijabarkan pada tabel III.1.

Tabel III.1. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis DISPUSAKA Prov.Sulteng Tahun 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		2022	2022	
2.1.2.17	Perpustakaan			
2.1.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (Orang)	12,089	26,065	215.61
2.1.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah (buku)	59,113	373,096	631.16
2.1.2.17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (angka)	0.19	0.15	78.95
2.1.2.17.4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/tahun (orang)	1007	2,172	215.69
2.1.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2808	68,174	2427.85



2.1.2.17.6	Jumlah Pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat (orang)	29	38	131.03
2.1.2.17.7	Pemenuhan Koleksi Kekhasan Daerah Tingkat Provinsi (eks)	1000	249	24.90
2.1.2.17.8	Penghargaan gerakan budaya gemar membaca ditingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat (orang)	525	67	12.76
2.1.2.17.9	Jumlah perpustakaan yang melaksanakan kegiatan berbasis inklusi sosial (Perpustakaan)	10	45	450.00
2.1.2.17.10	Terlaksananya perpustakaan berbasis inklusi sosial (Kab/Kota)	13	11	84.62
2.1.2.17.11	Jumlah para pengelola perpustakaan dan pustakawan (orang)	162	93	57.41
2.1.2.17.12	Jumlah Perpustakaan sekolah yang mendapatkan akreditasi (Perpustakaan)	19	10	52.63
2.1.2.17.13	Terlaksananya Kegiatan gemar membaca (Kota/Kab)	13	6	46.15
2.1.2.17.14	Pemenuhan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1313	249	18.96
2.1.2.18	Kearsipan			
2.1.2.18.1	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku) (OPD)	1	1	100.00
2.1.2.18.2	Peningkatan SDM Pengelola kearsipan (orang)	8	14	175.00



3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis

DISPUSAKA Tahun 2020, 2021 dan 2022 dijabarkan pada tabel III.2.

Tabel III.2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1.2.17	Perpustakaan									
2.1.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (Orang)	8,665	24,105	278	1,037	17,069	1,646	12,089	26,065	216
2.1.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah (buku)	45,873	373,096	813	52,493	373,096	711	59,113	373,096	631
2.1.2.17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (angka)	0.17	0.15	88	0.18	0.15	83	0.19	0.15	79
2.1.2.17.4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/tahun (orang)	722	2,009	278	865	1,422	164	1007	2,172	216
2.1.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2500	68,174	2,727	2654	68,174	2,569	2808	68,174	2,428
2.1.2.17.6	Jumlah Pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat (orang)	29	29	100	29	29	100	29	38	131
2.1.2.17.7	Pemenuhan Koleksi Kekhasan Daerah Tingkat Provinsi (eks)	0	51	51	600	122	20	1000	249	25
2.1.2.17.8	Penghargaan gerakan budaya gemar membaca ditingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat (orang)	152	150	99	525	150	29	525	67	13
2.1.2.17.9	Jumlah perpustakaan yang melaksanakan kegiatan berbasis inklusi sosial (Perpustakaan)	8	25	313	9	36	400	10	45	450
2.1.2.17.10	Terlaksananya perpustakaan berbasis inklusi sosial (Kab/Kota)	13	13	100	13	13	100	13	11	85



2.1.2.17.11	Jumlah para pengelola perpustakaan dan pustakawan (orang)	102	19	19	142	19	13	162	93	57
2.1.2.17.12	Jumlah Perpustakaan sekolah yang mendapatkan akreditasi (Perpustakaan)	6	19	317	9	19	211	19	10	53
2.1.2.17.13	Terlaksananya Kegiatan gemar membaca (Kota/Kab)	13	5	38	13	5	38	13	6	46
2.1.2.17.14	Pemenuhan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	452	51	11	860	122	14	1313	249	19
2.1.2.18	Kearsipan									
2.1.2.18.1	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku) (OPD)	1	1	100	1	1	100	1	1	100
2.1.2.18.2	Peningkatan SDM Pengelola kearsipan (orang)	8	8	100	8	8	100	8	14	175

3.1.3 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026 dijabarkan pada tabel III.3.

Tabel III.3. Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2026	Capaian Kinerja 2022	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3*100
2.1.2.17	Perpustakaan			
2.1.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (Orang)	17,225	26,065	151
2.1.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah (buku)	78,972	373,096	472
2.1.2.17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (angka)	0.23	0.15%	1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

2.1.2.17.4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/tahun (orang)	1,435	2,172	151
2.1.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	3,270	68,174	2,085
2.1.2.17.6	Jumlah Pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat (orang)	32	38	119
2.1.2.17.7	Pemenuhan Koleksi Kekhasan Daerah Tingkat Provinsi (eks)	2,200	249	11
2.1.2.17.8	Penghargaan gerakan budaya gemar membaca ditingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat (orang)	525	67	13
2.1.2.17.9	Jumlah perpustakaan yang melaksanakan kegiatan berbasis inklusi sosial (Perpustakaan)	12	45	375
2.1.2.17.10	Terlaksananya perpustakaan berbasis inklusi sosial (Kab/Kota)	13	11	85
2.1.2.17.11	Jumlah para pengelola perpustakaan dan pustakawan (orang)	212	93	44
2.1.2.17.12	Jumlah Perpustakaan sekolah yang mendapatkan akreditasi (Perpustakaan)	24	10	42
2.1.2.17.13	Terlaksananya Kegiatan gemar membaca (Kota/Kab)	13	6	46
2.1.2.17.14	Pemenuhan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	2,669	249	9
2.1.2.18	Kearsipan			
2.1.2.18.1	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku) (OPD)	1	1	100
2.1.2.18.2	Peningkatan SDM Pengelola kearsipan (orang)	8	14	175



3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator untuk mencapai tujuan mewujudkan pelayanan publik yang prima ini didukung adanya program perpustakaan dan kearsipan dengan sasaran meningkatkan kapasitas perpustakaan yang representatif, meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, penyelamatan dan penggunaan arsip provinsi yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk beberapa indikator yang belum mencapai target disebabkan karna masalah penganggaran yang mungkin berlebih maupun kurang sehingga dalam pelaksanaannya tidak mencapai target.

3.1.5 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran meningkatkan kapasitas perpustakaan yang representatif, meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, penyelamatan dan penggunaan arsip ini adalah sebanyak 6 (enam) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan, yaitu : program penunjang urusan pemerintah daerah dengan 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan, program pembinaan perpustakaan dengan 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan, program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, program pengelolaan kearsipan dengan 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan, program perlindungan dan penyelamatan arsip dengan 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan.



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dijabarkan pada tabel III.4.

Tabel III.4. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2022

1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)		3 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022	
	Indikator	Satuan	K	Rp
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		%	100	Rp 20,188,867,824
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Peran Perpustakaan Guna Menunjang Peningkatan Kualitas SDM	%	100	Rp 19,023,283,701
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	100	Rp 17,017,453,231
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Termanfaatkannya SAKIP Perangkat Daerah	%	100	Rp 320,327,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Rp 3,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	2	Rp 4,650,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	2	Rp 4,020,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	13	Rp 258,862,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	1	Rp 49,795,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Realisasi Anggaran	%	100	Rp 14,372,781,262
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	Rp 12,958,471,262



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	Rp 1,414,310,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 13,500,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	Rp -
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	Laporan	1	Rp 13,500,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	1	Rp 797,809,043
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	Rp 123,327,029
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	Rp 31,117,614
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	Rp 24,631,500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	Rp 618,732,900
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 92,516,780
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	Paket	1	Rp 92,516,780
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 573,747,646
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	Rp 509,817,646
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa dan Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	2	Rp 63,930,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 846,771,500



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	1	Rp 265,200,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	1	Rp 140,470,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	1	Rp 351,101,500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan dan jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Unit	2	Rp 90,000,000
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dokumen	1	Rp 1,834,807,475
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Dokumen Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Judul	25	Rp 876,208,600
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Judul Buku dalam Layanan Perpustakaan Berbasis Elektronik	Orang	40	Rp 51,530,000
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Para Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan serta Tersusunnya Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	1	Rp 27,337,000
Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan	Dokumen	1	Rp 120,874,750
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan	Dokumen	1	Rp 148,722,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Para Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan serta Tersusunnya Data dan Informasi Perpustakaan	Orang	40	Rp 196,768,500
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	989	Rp 275,795,500
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku yang diadakan	Eksemplar	400	Rp 15,120,000
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	Rp 40,060,850
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Dokumen Pembudayaan Gemar Membaca, Terlaksananya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan memberikan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca di Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Dokumen	1	Rp 958,598,875
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Gemar Membaca dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Orang	100	Rp 400,299,250
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	26	Rp 109,902,000
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Dokumen Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dokumen	1	Rp 182,146,475
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Orang	26	Rp 266,251,150



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	100	Rp 171,022,995
Pelestarian karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi	Termanfaatkannya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Literatur	100	Rp 36,974,800
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Menghimpun Koleksi yang diterbitkan oleh Instansi, Penerbit, Perorangan	Orang	40	Rp 36,974,800
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	Dokumen	0	Rp -
Penerbitan Katalog Induk Daerah / Pembuatan Sistem Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen Katalog Induk Daerah dan Jumlah Literatur Sekunder Lainnya yang di Terbitkan	Entry	0	Rp -
Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	0	Rp -
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	Rp 96,910,695
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Peserta Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	40	Rp 52,800,695
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalimediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	30	Rp 44,110,000
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	Rp 37,137,500
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara/Rapat Seleksi Pengadaan Literasi	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang diadakan	Eksemplar	300	Rp 20,220,000
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengolahan dan Penyiangan Bahan Koleksi	Eksemplar	300	Rp 16,917,500



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pengelolaan Kearsipan	%	100	Rp 1,165,584,123
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik"	%	100	Rp 1,050,443,873
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Termanfaatkannya Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Laporan	1	Rp 452,246,600
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis	Arsip	1600	Rp 168,911,200
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Terpeliharanya Arsip	Arsip	1600	Rp 10,437,000
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan	Dokumen	1	Rp 272,898,400
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Pengelolaan Arsip Statis Daerah	%	100	Rp 221,709,000
Pengumpulan dan Penyimpanan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Terkumpulnya Arsip Terjaga	Arsip	35	Rp 32,677,500
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Terpeliharanya Arsip Statis	Arsip	235	Rp 189,031,500
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Termanfaatkannya Pencipta Arsip dan LKD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar	%	100	Rp 376,488,273
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Arsip secara Prima melalui JIKN	Kabupaten	3	Rp 22,090,000
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Pencipta Arsip dan LKD yang di awasi	65 Lks	65	Rp 354,398,273
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Dalam Pelestarian Arsip Daerah	%	100	Rp 115,140,250



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Termanfaatkannya Laporan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Laporan	2	Rp	14,688,800
Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Laporan Teridentifikasi Arsip Musnah	Laporan	1	Rp	9,205,000
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Laporan Terlaksananya Pemusnahan Arsip	Laporan	1	Rp	5,483,800
Perlindungan dan penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Provinsi	Termanfaatkannya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100	Rp	17,995,000
Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Laporan Kegiatan Pindahan Arsip dari Lokasi Bencana	Laporan	1	Rp	8,790,000
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Laporan Kegiatan Pindahan Arsip dari Lokasi Bencana	Laporan	1	Rp	9,205,000
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi Yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Termanfaatkannya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	%	100	Rp	45,133,800
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pendataan Arsip OPD yang digabung	Laporan	1	Rp	10,746,000
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pendataan Arsip OPD yang dibubarkan	Laporan	1	Rp	10,746,000
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Pendampingan Penyelamatan Arsip secara maksimal	Tim	1	Rp	23,641,800



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Termanfaatkannya Laporan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Laporan	2	Rp 17,444,500
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Laporan Autentisitas Arsip	Laporan	1	Rp 9,717,000
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Laporan Penilaian Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Laporan	1	Rp 7,727,500
Pencarian Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang	Termanfaatkannya Laporan Pencarian Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Laporan	3	Rp 19,878,150
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Laporan Autentisitas Arsip yang Dinyatakan Hilang	Laporan	1	Rp 9,205,000
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Laporan Autentisitas Arsip Digital Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Laporan	2	Rp 6,388,050
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Tersedianya Waktu Penetapan DPA	Laporan	1	Rp 4,285,100
			100%	Rp 20,188,867,824

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran belanja DISPUSAKA Prov Sulteng tahun 2022 sebelum perubahan adalah Rp 18.102.346.488 dan setelah perubahan adalah Rp 20.188.867.824,00. Realisasi anggaran tahun 2022 adalah Rp 18.593.234.305,00 atau 92,10%. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu :



a. Belanja Operasi

Anggaran dalam Belanja Operasi terdiri atas :

- Belanja Pegawai dengan besaran anggaran Rp 13.005.571.262,00 terealisasi Rp 11.610.644.753,00 atau 89,27%.
- Belanja Barang dan Jasa dengan besaran anggaran Rp 7.089.679.182,00 terealisasi Rp 6.889.043.077,00 atau 97,17%.

b. Belanja Modal

Anggaran dalam Belanja Modal terdiri atas :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan besaran anggaran Rp 93.617.380,00 terealisasi Rp 93.546.475,00 atau 99,92%.

Realisasi belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai kurang maksimal disebabkan karena adanya pejabat struktural dan fungsional yang meninggal dan pensiun.

Anggaran dan realisasi keuangan belanja tahun 2022 pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan pada tabel III.5.



Tabel III.5. Anggaran dan Realisasi Belanja per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

1	2		3		4	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		%	100	Rp 20,188,867,824	92.10	Rp 18,593,234,305
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Peran Perpustakaan Guna Menunjang Peningkatan Kualitas SDM	%	100	Rp 19,023,283,701	91.97	Rp 17,495,744,091
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	100	Rp 17,017,453,231	91.57	Rp 15,582,412,449
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Termanfaatkannya SAKIP Perangkat Daerah	%	100	Rp 320,327,000	99.89	Rp 319,977,460
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Rp 3,000,000	1	Rp 3,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	2	Rp 4,650,000	2	Rp 4,650,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	2	Rp 4,020,000	2	Rp 4,020,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	13	Rp 258,862,000	13	Rp 258,797,460
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	1	Rp 49,795,000	1	Rp 49,510,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Realisasi Anggaran	%	100	Rp 14,372,781,262	90.23	Rp 12,969,031,753
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	Rp 12,958,471,262	12	Rp 11,563,544,753
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	Rp 1,414,310,000	12	Rp 1,405,487,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 13,500,000	1	Rp 9,112,800
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	Rp -	0	Rp -
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	Laporan	1	Rp 13,500,000	1	Rp 9,112,800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	1	Rp 797,809,043	1	Rp 780,871,253
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	Rp 123,327,029	1	Rp 123,327,029
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	Rp 31,117,614	1	Rp 31,117,614
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	Rp 24,631,500	1	Rp 24,627,500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	Rp 618,732,900	1	Rp 601,799,110
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 92,516,780	1	Rp 92,445,875
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	Paket	1	Rp 92,516,780	1	Rp 92,445,875
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 573,747,646	1	Rp 565,938,194
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	Rp 509,817,646	12	Rp 503,338,194
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa dan Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	2	Rp 63,930,000	2	Rp 62,600,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	Rp 846,771,500	1.00	Rp 845,035,114



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	1	Rp 265,200,000	1	Rp 265,200,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	1	Rp 140,470,000	1	Rp 139,379,714
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	1	Rp 351,101,500	1	Rp 350,455,400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan dan jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Unit	2	Rp 90,000,000	2	Rp 90,000,000
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dokumen	1	Rp 1,834,807,475	1.0	Rp 1,753,732,047
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Dokumen Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Judul	25	Rp 876,208,600	23	Rp 809,258,320
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Judul Buku dalam Layanan Perpustakaan Berbasis Elektronik	Orang	40	Rp 51,530,000	19	Rp 49,697,260
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Para Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan serta Tersusunnya Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	1	Rp 27,337,000	1	Rp 21,362,600
Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan	Dokumen	1	Rp 120,874,750	1	Rp 120,134,750
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan	Dokumen	1	Rp 148,722,000	0.9	Rp 126,492,000
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Para Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan serta Tersusunnya Data dan Informasi Perpustakaan	Orang	40	Rp 196,768,500	35	Rp 173,948,960



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	989	Rp 275,795,500	967	Rp 269,715,500
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku yang diadakan	Eksemplar	400	Rp 15,120,000	246	Rp 9,310,000
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	Rp 40,060,850	1	Rp 38,597,250
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Dokumen Pembudayaan Gemar Membaca, Terlaksananya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan memberikan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca di Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Dokumen	1	Rp 958,598,875	1	Rp 944,473,727
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Gemar Membaca dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Orang	100	Rp 400,299,250	98	Rp 394,086,260
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	26	Rp 109,902,000	25	Rp 106,935,280
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Dokumen Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dokumen	1	Rp 182,146,475	1	Rp 181,377,619
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Orang	26	Rp 266,251,150	25.6	Rp 262,074,568
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	100	Rp 171,022,995	93	Rp 159,599,595
Pelestarian karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi	Termanfaatkannya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Literatur	100	Rp 36,974,800	100	Rp 36,974,800
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Menghimpun Koleksi yang diterbitkan oleh Instansi, Penerbit, Perorangan	Orang	40	Rp 36,974,800	40	Rp 36,974,800



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	Dokumen	0	Rp -	0	Rp -
Penerbitan Katalog Induk Daerah / Pembuatan Sistem Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen Katalog Induk Daerah dan Jumlah Literatur Sekunder Lainnya yang di Terbitkan	Entry	0	Rp -	0	Rp -
Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	0	Rp -	0	Rp -
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	Rp 96,910,695	90	Rp 86,787,295
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Peserta Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	40	Rp 52,800,695	40	Rp 52,800,295
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalimediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	30	Rp 44,110,000	24	Rp 33,987,000
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	Rp 37,137,500	96	Rp 35,837,500
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara/Rapat Seleksi Pengadaan Literasi	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang diadakan	Eksemplar	300	Rp 20,220,000	294	Rp 19,820,000
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengolahan dan Penyiangan Bahan Koleksi	Eksemplar	300	Rp 16,917,500	284	Rp 16,017,500
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pengelolaan Kearsipan	%	100	Rp 1,165,584,123	94	Rp 1,097,490,214
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik"	%	100	Rp 1,050,443,873	94	Rp 991,388,264
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Termanfaatkannya Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Laporan	1	Rp 452,246,600	0.9	Rp 429,057,900



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis	Arsip	1600	Rp 168,911,200	1530	Rp 161,522,860
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Terpeliharanya Arsip	Arsip	1600	Rp 10,437,000	1154	Rp 7,527,600
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan	Dokumen	1	Rp 272,898,400	1.0	Rp 260,007,440
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Pengelolaan Arsip Statis Daerah	%	100	Rp 221,709,000	90	Rp 200,038,463
Pengumpulan dan Penyimpanan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Terkumpulnya Arsip Terjaga	Arsip	35	Rp 32,677,500	33	Rp 30,857,500
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Terpeliharanya Arsip Statis	Arsip	235	Rp 189,031,500	210	Rp 169,180,963
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Termanfaatkannya Pencipta Arsip dan LKD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar	%	100	Rp 376,488,273	96	Rp 362,291,901
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Arsip secara Prima melalui JIKN	Kabupaten	3	Rp 22,090,000	3	Rp 21,840,000
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Pencipta Arsip dan LKD yang di awasi	65 Lks	65	Rp 354,398,273	62	Rp 340,451,901
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Dalam Pelestarian Arsip Daerah	%	100	Rp 115,140,250	92	Rp 106,101,950
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Termanfaatkannya Laporan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Laporan	2	Rp 14,688,800	2	Rp 12,317,400
Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Laporan Teridentifikasi Arsip Musnah	Laporan	1	Rp 9,205,000	1	Rp 6,833,600
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Laporan Terlaksananya Pemusnahan Arsip	Laporan	1	Rp 5,483,800	1	Rp 5,483,800
Perlindungan dan penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Provinsi	Termanfaatkannya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100	Rp 17,995,000	92	Rp 16,568,200



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Laporan Kegiatan Pemindahan Arsip dari Lokasi Bencana	Laporan	1	Rp 8,790,000	1	Rp 8,640,000
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Laporan Kegiatan Pemindahan Arsip dari Lokasi Bencana	Laporan	1	Rp 9,205,000	1	Rp 7,928,200
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi Yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Termanfaatkannya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	%	100	Rp 45,133,800	98	Rp 44,193,800
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pendataan Arsip OPD yang digabung	Laporan	1	Rp 10,746,000	1	Rp 10,746,000
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pendataan Arsip OPD yang dibubarkan	Laporan	1	Rp 10,746,000	1	Rp 10,746,000
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Pendampingan Penyelamatan Arsip secara maksimal	Tim	1	Rp 23,641,800	1	Rp 22,701,800
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Termanfaatkannya Laporan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Laporan	2	Rp 17,444,500	1.8	Rp 15,515,800
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Laporan Autentisitas Arsip	Laporan	1	Rp 9,717,000	0.8	Rp 8,238,300
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Laporan Penilaian Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Laporan	1	Rp 7,727,500	0.9	Rp 7,277,500
Pencarian Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang	Termanfaatkannya Laporan Pencarian Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Laporan	3	Rp 19,878,150	1	Rp 17,506,750
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Laporan Autentisitas Arsip yang Dinyatakan Hilang	Laporan	1	Rp 9,205,000	1	Rp 6,833,600



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Laporan Autentisitas Arsip Digital Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Laporan	2	Rp 6,388,050	2	Rp 6,388,050
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Tersedianya Waktu Penetapan DPA	Laporan	1	Rp 4,285,100	1	Rp 4,285,100
			100%	Rp 20,188,867,824	92.10	Rp 18,593,234,305

Berdasarkan data realisasi penyerapan DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2022 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 18.593.234.305,00,- (92,10%).

Tingkat penyerapan DPA tahun 2022 menunjukkan bahwa realisasi anggaran cukup efisien dalam pelaksanaan anggaran terhadap capaian keluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, pelaksanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada TA 2022 telah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketercapaian target-target kinerja pada 2022 yang mencapai 100% atau melebihi target dan realisasi anggaran pada 2022 yang mencapai 92,10%. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target-target kinerja dan/atau dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran bersangkutan sebagaimana diuraikan di Bab 3 Akuntabilitas Kinerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2022 telah berhasil melaksanakan seluruh program dan/atau kegiatan pada TA 2022 dengan anggaran akhir sebesar Rp. 18.593.234.305,00,-

Langkah selanjutnya bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan tetap meningkatkan kualitas layanan serta kualitas pelaksanaan program dan/atau kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan.



Kendala-kendala seperti *human error*, koordinasi yang kurang optimal, dan keterlambatan penyelesaian layanan diharapkan bisa diminimalisir dan diselesaikan dengan baik pada 2023.

Demikian LKIP ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah serta sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan arah kebijakan pada masa yang akan datang sehingga tercipta kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan outcome yang optimal.

Palu, 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640919 199003 1 009